



Integrasi Teknologi Digital dalam Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar

Mohammad Rezza Fahlevvi^{1*}, Kadek Agus Prasdy Indra Kusuma², Muhammad Wahyu Anugerah³

^{1,2,3} Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 13, 2025

Revised May 30, 2025

Accepted May 31, 2025

Available online May 31, 2025

Kata Kunci :

Inspektorat Daerah, Pengawasan ASTAMA, Praktik Manual, Teknologi Digital, Transformasi,

Keywords:

ASTAMA Supervision, Digital Technology Manual Practice, Regional Inspectorate, Transformation,



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Mohammad Rezza Fahlevvi, Kadek Agus Prasdy Indra Kusuma, Muhammad Wahyu Anugerah.
Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar masih didominasi oleh praktik manual dalam bentuk pendampingan langsung, pengarsipan fisik, dan penyusunan laporan secara konvensional. Praktik ini menunjukkan karakteristik khas berupa pendekatan humanis, komunikasi langsung dengan entitas yang diawasi, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan konteks lapangan. Namun, di sisi lain, pendekatan manual cenderung menyita waktu, rentan terhadap kesalahan administratif, dan terbatas dari segi efisiensi data. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik manual tersebut dan mengevaluasi potensi serta tantangan integrasi teknologi digital dalam mendukung efektivitas program pendampingan dan asistensi pengawasan. Hasil observasi selama kegiatan praktik kerja lapangan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak terhadap sistem digital yang mampu merekam jejak pendampingan secara real-time, menyimpan dokumen pengawasan secara terpusat, dan menyediakan dashboard pemantauan progres desa binaan. Potensi integrasi digital sangat besar, terutama dalam meningkatkan kecepatan analisis dan kualitas dokumentasi. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan literasi digital pegawai, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital dalam pengawasan internal bergantung pada kombinasi antara kesiapan teknologi dan strategi perubahan budaya birokrasi

ABSTRACT

Internal oversight activities by the Regional Inspectorate of Gianyar Regency are still predominantly conducted through manual practices such as direct mentoring, physical document archiving, and conventional report preparation. These practices are characterized by a humanistic approach, direct communication with the supervised entities, and flexibility in adapting to field contexts. However, on the other hand, manual methods tend to be time-consuming, prone to administrative errors, and limited in terms of data efficiency. This study aims to examine these manual practices and evaluate the potential and challenges of integrating digital technology to enhance the effectiveness of mentoring and internal supervision programs. Observations during the internship revealed an urgent need for a digital system capable of tracking mentoring activities in real time, storing supervisory documents in a centralized manner, and providing a dashboard for monitoring the progress of assisted villages. The potential for digital integration is significant, particularly in accelerating analysis and improving documentation quality. However, challenges include limited digital literacy among staff, unequal technological infrastructure, and resistance to changes in work systems. Therefore, the success of digital transformation in internal supervision depends on a combination of technological readiness and strategies for changing bureaucratic culture.

*Corresponding author

E-mail addresses: rezza@ipdn.ac.id (Mohammad Rezza Fahlevvi)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk bergerak ke arah transformasi digital guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik ([Dwiyanto, 2018](#)). Dalam konteks ini, digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan yang harus segera diadopsi oleh setiap perangkat daerah untuk menjawab tantangan zaman dan ekspektasi masyarakat yang terus berkembang. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sistem pengawasan internal. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah menjadi pilar utama dalam memastikan akuntabilitas kinerja birokrasi serta pencegahan terhadap penyimpangan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program ([T. Kurniawan, 2020](#)).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan efisiensi, transparansi, dan partisipasi ([Siregar, 2021](#)). Di banyak negara, digitalisasi menjadi fondasi utama reformasi birokrasi, termasuk dalam konteks pengawasan internal sebagai instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas publik. Transformasi digital tidak hanya dilihat sebagai alat bantu administratif, tetapi sebagai medium strategis yang mampu mempercepat proses kerja, memperluas jangkauan pengawasan, dan memperkuat sistem pengambilan keputusan berbasis data ([Wibowo, 2020](#)).

Dalam sistem pemerintahan daerah, fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah memegang peran penting sebagai pengawal integritas birokrasi. Tugas pengawasan ini mencakup audit operasional, evaluasi pelaksanaan program, monitoring keuangan, serta asistensi terhadap perangkat daerah dan desa ([Yani, 2022](#)). Oleh karena itu, efektivitas fungsi pengawasan sangat bergantung pada sistem kerja yang digunakan, baik dari sisi metode, dokumentasi, hingga pelaporan. Dalam era digital, sistem pengawasan idealnya didukung oleh teknologi informasi yang memungkinkan proses pengawasan berlangsung secara real-time, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dievaluasi secara berkala ([T. Gunawan, 2021](#)).

Namun demikian, kesenjangan antara gagasan digitalisasi dan realitas pelaksanaan di lapangan masih menjadi isu yang mengemuka. Di berbagai daerah, pengawasan masih dijalankan secara manual, dengan ketergantungan tinggi pada dokumen fisik, laporan tertulis konvensional, dan komunikasi informal yang sulit dilacak secara administratif. Kesenjangan ini menimbulkan konsekuensi serius, antara lain keterlambatan dalam pengambilan keputusan, rendahnya akurasi data, serta lemahnya sistem pertanggungjawaban internal. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa tanpa integrasi sistem informasi yang baik, fungsi pengawasan cenderung menjadi simbolis dan tidak mampu menekan penyimpangan secara signifikan ([Tummers, 2021](#)).

Dari sudut pandang teoritis, digitalisasi pengawasan dapat dijelaskan melalui pendekatan *New Public Management* (NPM) yang mendorong sektor publik untuk mengadopsi praktik efisiensi seperti di sektor swasta, termasuk dalam penggunaan teknologi untuk pengukuran kinerja dan transparansi ([Osborne, 2010](#)). Selain itu, teori *technology acceptance model* (TAM) juga relevan untuk menjelaskan sejauh mana auditor atau pengelola pengawasan menerima dan menggunakan sistem digital, yang dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, serta dukungan kelembagaan ([Davis, 2000](#)).

Realitas implementasi pengawasan internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar mencerminkan kondisi umum birokrasi daerah yang masih didominasi oleh pendekatan manual. Proses pengawasan dilakukan dengan dokumentasi fisik, komunikasi non-formal, serta pelaporan yang belum terstandarisasi secara digital. Dalam pelaksanaan program asistensi seperti ASTAMA (Asistensi Tata Kelola Pemerintahan Desa), pengumpulan data masih mengandalkan pencatatan tangan dan rekap dokumen cetak, yang kemudian disusun secara

manual oleh auditor untuk dilaporkan kepada pimpinan. Akibatnya, proses pelacakan data, akurasi laporan, serta efisiensi kerja menjadi sangat terbatas ([Prasetyo, 2023](#)).

Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses pengambilan keputusan, tetapi juga melemahkan sistem pengawasan sebagai instrumen kontrol internal yang seharusnya adaptif terhadap dinamika dan kompleksitas tata kelola pemerintahan desa. Terlebih lagi, keterbatasan jumlah auditor dan luasnya cakupan wilayah desa binaan membuat efektivitas pengawasan menjadi kurang optimal tanpa dukungan teknologi yang memadai. Penelitian ini memandang bahwa titik lemah bukan terletak pada minimnya SDM semata, tetapi pada belum hadirnya sistem kerja digital yang mampu menghubungkan seluruh proses kerja secara integratif dan berkelanjutan ([Wulandari, 2022](#)).

Di sisi lain, terdapat potensi yang cukup besar dalam mendorong digitalisasi sistem pengawasan di lingkungan Inspektorat Gianyar. Mayoritas auditor muda telah memiliki keterampilan dasar penggunaan perangkat digital, serta menunjukkan minat terhadap inovasi sistem kerja yang lebih efisien. Infrastruktur dasar seperti komputer, koneksi internet, dan perangkat lunak produktivitas juga mulai tersedia meskipun belum merata ([Susanti, 2021](#)). Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan tidak mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan pemetaan potensi dan strategi penerapan yang kontekstual sesuai karakteristik kelembagaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik pengawasan manual yang masih berjalan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar;
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam praktik tersebut; dan
3. Mengevaluasi potensi penerapan sistem pengawasan digital dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang transformasi digital dalam birokrasi daerah, khususnya di bidang pengawasan internal. Sementara secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun kebijakan strategis berbasis teknologi yang mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Dengan menganalisis praktik pengawasan secara kontekstual, penelitian ini juga berkontribusi dalam menguatkan peran Inspektorat sebagai aktor utama dalam reformasi birokrasi berbasis data dan teknologi..

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep Pengawasan Internal dalam Pemerintahan Daerah

Pengawasan internal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang pada tingkat kabupaten/kota dijalankan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut ([Mardiasmo, 2018](#)), efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh struktur sistem kerja, kualitas sumber daya manusia, serta kelengkapan instrumen pengawasan. Dalam praktiknya, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai auditor administratif, tetapi juga sebagai fasilitator reformasi tata kelola melalui kegiatan evaluasi, reviu, monitoring, dan asistensi. Namun demikian, berbagai studi mengungkapkan bahwa pengawasan internal di level daerah masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan SDM, kurangnya instrumen berbasis teknologi, serta sistem informasi yang belum terintegrasi ([Nugroho, 2020](#)).

Keterbatasan Pendekatan Manual dalam Pengawasan

Sejumlah literatur menyoroti bahwa praktik pengawasan di pemerintahan daerah masih didominasi oleh pendekatan manual. Hal ini tercermin dalam penggunaan dokumen fisik, pencatatan non-digital, serta sistem komunikasi yang bersifat langsung dan tidak terdokumentasi ([D. Kurniawan & Nugroho, 2020](#)). Pendekatan manual kerap dipertahankan karena dinilai lebih fleksibel dan humanis, terutama dalam membangun hubungan personal antara auditor dan entitas yang diawasi. Namun, pendekatan ini juga menyimpan kelemahan serius, seperti rendahnya efisiensi pelaporan, lemahnya akurasi dokumentasi, serta kesulitan dalam melakukan evaluasi longitudinal ([Pertiwi et al., 2021](#)).

Ketika volume dan kompleksitas kegiatan pengawasan meningkat, seperti dalam konteks asistensi program pembangunan desa, pendekatan manual menjadi tidak lagi memadai. Menurut ([H. Gunawan & Suryadi, 2022](#)), sistem manual tidak mampu mendukung akumulasi data yang besar dan tidak menyediakan visibilitas yang diperlukan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan pengawasan ke arah sistem berbasis teknologi.

Digitalisasi Pengawasan dan Urgensi Transformasi Sistem

Transformasi digital dalam pengawasan publik menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi di sektor pemerintahan. Digitalisasi memungkinkan pencatatan kegiatan pengawasan secara real-time, penyimpanan data terpusat, serta kemudahan dalam monitoring dan evaluasi lintas waktu. Studi oleh ([Hansen et al., 2021](#)) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pengawasan internal meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelaporan, serta mengurangi risiko kehilangan atau manipulasi data.

Dalam konteks pemerintah daerah, digitalisasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesiapan organisasi, literasi digital pegawai, serta kesesuaian kebijakan yang mendukung adopsi sistem baru. ([Kartika & Rahayu, 2019](#)) menekankan pentingnya manajemen perubahan (*change management*) dalam proses digitalisasi agar tidak terjadi resistensi di level implementasi. Oleh karena itu, studi terhadap kesiapan dan potensi transformasi digital di tingkat daerah menjadi penting sebagai dasar kebijakan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan aktual ([Rahmawati, 2020](#)).

Program ASTAMA sebagai Model Asistensi Pemerintahan Desa

Program ASTAMA (Asistensi Tanggal Lima) merupakan inisiatif Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan desa. Program ini menggabungkan pendekatan pengawasan dan pembinaan melalui asistensi teknis langsung kepada perangkat desa. Fokus utama program mencakup pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan dan anggaran desa. ASTAMA merepresentasikan praktik pengawasan partisipatif yang mendekatkan auditor dengan masyarakat desa, serta mendorong pemahaman terhadap regulasi yang berlaku ([KemenPAN-RB, 2021](#)).

Namun demikian, program ini masih dijalankan secara konvensional, dengan ketergantungan tinggi pada pencatatan manual dan komunikasi non-digital. Oleh karena itu, transformasi ASTAMA menuju model pengawasan berbasis digital menjadi penting untuk meningkatkan jangkauan, efisiensi, dan keberlanjutan program di tengah tantangan sumber daya dan luasan wilayah desa binaan ([Astuti & Lestari, 2022](#)).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat berbagai fenomena yang diamati di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami praktik manual dalam pelaksanaan pengawasan internal serta mengevaluasi peluang dan tantangan integrasi teknologi digital di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial, budaya kerja, serta persepsi yang berkembang di lingkungan birokrasi pengawasan secara mendalam.

Subjek penelitian adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar, yang menjadi lokasi pelaksanaan Magang III oleh Praja Tingkat III Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pendampingan dan asistensi yang dilakukan oleh auditor kepada perangkat daerah dan pemerintah desa, dengan fokus utama pada pelaksanaan Program ASTAMA. Pengamatan difokuskan pada sistem kerja manual yang masih dominan serta pola interaksi antara auditor dengan entitas yang diawasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. **Observasi langsung** terhadap aktivitas rutin pengawasan selama satu bulan, baik di lingkungan kantor maupun di lapangan.
2. **Wawancara informal** dengan beberapa pegawai, termasuk auditor dan staf teknis, untuk menggali persepsi mengenai praktik manual dan kesiapan terhadap digitalisasi.
3. **Studi dokumentasi** terhadap laporan hasil audit, catatan asistensi desa, serta regulasi yang berkaitan dengan pengawasan internal.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan induktif. Proses analisis dimulai dari pencatatan hasil observasi dalam jurnal harian, dilanjutkan dengan identifikasi tema-tema penting seperti hambatan administratif, efisiensi kerja, serta pola interaksi yang muncul dalam praktik manual. Hasil wawancara ditranskripsikan secara naratif, sedangkan dokumen dianalisis untuk memperkuat dan mengkonfirmasi temuan lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini diterapkan guna memastikan bahwa data yang dianalisis tidak bersifat subjektif, tetapi merepresentasikan gambaran yang utuh dan objektif. Selain itu, refleksi harian selama masa magang juga digunakan sebagai alat introspektif dalam menjaga relevansi dan kejujuran analisis.

Secara keseluruhan, metode ini dirancang tidak hanya untuk menghasilkan deskripsi keadaan aktual di lapangan, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi solusi berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong modernisasi sistem pengawasan internal dan memperkuat kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem Pengawasan Internal di Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan perangkat pengawasan internal pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Fungsi utama lembaga ini meliputi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah dan pemerintah desa. Di Kabupaten Gianyar, fungsi tersebut dijalankan oleh unit-unit pengawasan yang tersebar dalam beberapa bidang, termasuk bidang pengawasan keuangan daerah, pengawasan pembangunan, serta bidang pengawasan aparatur dan desa.

Secara umum, pelaksanaan pengawasan internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar masih menitikberatkan pada pendekatan langsung (face-to-face) antara auditor dan

entitas yang diawasi. Proses kerja dimulai dari penjadwalan kegiatan pengawasan, pelaksanaan entry meeting, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan hasil pengawasan. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan secara manual, dengan pemanfaatan dokumen cetak sebagai alat bantu utama dalam pencatatan temuan, analisis, dan penyusunan rekomendasi.

Kegiatan asistensi kepada perangkat daerah dan desa binaan umumnya dilakukan melalui pertemuan tatap muka, di mana auditor memberikan arahan, klarifikasi, atau bimbingan teknis mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Selama kegiatan berlangsung, pencatatan hasil asistensi dilakukan dalam bentuk tulisan tangan atau menggunakan formulir standar yang dicetak. Setelah kegiatan selesai, seluruh dokumen dikumpulkan dan direkap oleh koordinator tim, lalu digunakan sebagai dasar penyusunan laporan akhir.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan yang berlaku masih sangat bergantung pada kehadiran fisik auditor dan interaksi langsung dengan sasaran pengawasan. Meskipun pendekatan ini memungkinkan adanya relasi personal dan komunikasi yang intensif, namun secara kelembagaan hal ini menciptakan ketergantungan terhadap kapasitas individu, serta berisiko terhadap kehilangan data, tumpang tindih informasi, dan ketidakteraturan dalam dokumentasi. Belum adanya sistem kerja berbasis digital membuat proses monitoring dan evaluasi jangka panjang menjadi sulit untuk dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana pola pengawasan manual ini berjalan, serta membuka ruang diskusi terkait potensi penguatan sistem melalui intervensi teknologi. Hal ini menjadi landasan penting untuk membangun sistem pengawasan yang tidak hanya responsif secara teknis, tetapi juga berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan era digital.

Temuan Lapangan Mengenai Praktik Manual

Hasil observasi langsung selama pelaksanaan kegiatan magang di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar mengungkapkan bahwa sebagian besar proses pengawasan, khususnya dalam kegiatan asistensi dan pendampingan, masih dilakukan secara manual. Aktivitas seperti pengumpulan data, pencatatan hasil pengamatan, dan penyusunan laporan dilakukan dengan media cetak seperti formulir fisik, buku kerja, dan laporan tertulis. Dalam banyak kasus, pencatatan dilakukan secara manual menggunakan tulisan tangan sebelum diketik ulang untuk keperluan pelaporan.

Setiap auditor memiliki metode sendiri dalam mengelola data, tanpa adanya sistem atau template digital yang baku. Hasilnya, terdapat perbedaan mencolok dalam struktur dan kualitas laporan yang dihasilkan antar tim auditor. Ketika dilakukan pengamatan terhadap kegiatan entry meeting dan follow-up monitoring, ditemukan bahwa dokumentasi hasil kegiatan tidak selalu tersedia secara lengkap, terutama ketika terjadi perubahan personel tim di tengah proses pengawasan. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem dokumentasi dan penyimpanan data, yang idealnya dapat terintegrasi dalam satu sistem manajemen informasi.

Dari sisi operasional, alur kerja auditor masih sangat bergantung pada koordinasi manual. Koordinator tim mengumpulkan seluruh hasil catatan dari anggota, kemudian menyusunnya secara manual menjadi satu laporan kolektif. Tidak terdapat sistem jaringan internal atau platform kolaboratif yang memfasilitasi sinkronisasi data secara real-time antar anggota tim. Akibatnya, proses kerja menjadi lambat, tidak efisien, dan sangat bergantung pada kehadiran fisik masing-masing anggota dalam satu ruang kerja.

Lebih lanjut, komunikasi antar auditor dan antara auditor dengan perangkat daerah lebih sering dilakukan melalui pesan instan pribadi atau diskusi langsung. Hal ini menyulitkan pencatatan historis komunikasi dan tidak menjamin keberadaan arsip informasi yang dapat diakses ulang. Dalam satu kasus, peneliti mencatat bahwa klarifikasi data antara auditor dan entitas yang diawasi hanya dilakukan secara lisan dan tidak tercantum dalam berita acara atau

laporan tertulis. Ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi saat dilakukan evaluasi akhir.

Ketika dilakukan peninjauan terhadap arsip dan laporan pengawasan sebelumnya, ditemukan pula bahwa penyimpanan dokumen belum tersentralisasi secara digital. Dokumen audit disimpan secara fisik di masing-masing unit bidang, tanpa backup digital yang memadai. Hal ini membuat proses pencarian dokumen terdahulu menjadi memakan waktu dan rentan terhadap kehilangan data karena kerusakan fisik atau pergantian personel.

Secara keseluruhan, temuan lapangan ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan internal di Inspektorat Daerah Gianyar masih bersifat fragmented dan belum terdigitalisasi. Dominasi praktik manual tidak hanya menghambat efektivitas kerja, tetapi juga mengurangi kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan yang akurat, cepat, dan akuntabel. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi kesiapan lembaga dalam menghadapi tantangan digitalisasi birokrasi secara menyeluruh.

Kelemahan dan Tantangan Pendekatan Manual

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar, pendekatan manual dalam pelaksanaan pengawasan internal menyimpan berbagai kelemahan yang secara langsung berdampak pada efisiensi dan akurasi pelaksanaan tugas. Kelemahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga menuntut perhatian dalam konteks reformasi birokrasi berbasis digital.

Salah satu kelemahan utama dari pendekatan manual adalah rendahnya efisiensi operasional. Setiap tahapan kegiatan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, membutuhkan waktu yang relatif lama karena bergantung pada pencatatan fisik dan proses rekapitulasi manual. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dari lapangan dapat berlipat ganda karena harus menunggu form isian dari masing-masing auditor, yang kemudian diketik ulang oleh staf administratif. Proses ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga membuka celah kesalahan input data dan ketidaksesuaian antar versi dokumen.

Selain itu, akurasi dan keandalan data menjadi tantangan serius. Ketika tidak ada sistem pengawasan berbasis digital, pelacakan jejak audit (audit trail) menjadi sangat terbatas. Beberapa catatan lapangan penting kerap tidak tercatat secara formal karena disampaikan secara lisan atau melalui media komunikasi pribadi yang tidak terdokumentasi. Akibatnya, bukti-bukti administratif menjadi lemah saat dilakukan evaluasi atau audit lanjutan.

Keterbatasan kolaborasi tim juga menjadi dampak signifikan dari sistem manual. Tanpa adanya platform bersama atau jaringan internal yang menghubungkan auditor dalam satu tim, setiap individu bekerja dalam silo (unit terpisah) yang membuat pertukaran informasi berjalan lambat. Dalam praktiknya, perbedaan cara kerja antar auditor menyebabkan ketidakkonsistenan dalam standar pelaporan, yang akhirnya menyulitkan proses kompilasi laporan akhir.

Dari aspek struktural, tidak adanya sistem database terintegrasi menyulitkan proses penyimpanan dan pencarian kembali data historis. Sebagian besar dokumen hanya disimpan dalam bentuk fisik atau dalam format digital yang tidak terorganisir dengan baik, seperti file individual di perangkat pribadi auditor. Hal ini berisiko tinggi terhadap kehilangan data karena kerusakan file, pemutusan hubungan kerja, atau rotasi personel.

Adapun dari aspek kultural, ditemukan resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai senior. Budaya kerja yang telah terbentuk selama bertahun-tahun berbasis pada sistem manual sulit digantikan tanpa adanya intervensi pelatihan, sosialisasi, dan kepemimpinan transformasional. Dalam wawancara informal, beberapa pegawai mengungkapkan keraguan terhadap sistem digital karena dianggap rumit atau tidak sesuai dengan gaya kerja mereka.

Resistensi semacam ini menjadi penghambat dalam proses adopsi teknologi secara menyeluruh.

Dengan berbagai kelemahan tersebut, pendekatan manual dalam pengawasan internal tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tata kelola pemerintahan modern yang menuntut kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas tinggi. Oleh karena itu, transisi menuju sistem digital menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyentuh aspek manajemen perubahan, penguatan kapasitas SDM, dan reformasi struktur kerja.

Potensi Penggunaan Teknologi dalam Proses Pengawasan

Dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ditimbulkan oleh pendekatan manual, integrasi teknologi digital dalam proses pengawasan internal menawarkan solusi strategis yang sangat potensial. Observasi lapangan dan wawancara informal menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui pemanfaatan sistem digital, baik dari sisi efisiensi, akurasi, maupun pelaporan.

Salah satu potensi utama terletak pada penggunaan sistem informasi manajemen pengawasan yang memungkinkan pencatatan kegiatan secara real-time dan terpusat. Dengan sistem ini, auditor dapat langsung menginput hasil pengamatan di lapangan melalui perangkat digital seperti tablet atau laptop, yang kemudian tersimpan otomatis dalam database internal. Data yang tersentralisasi ini tidak hanya memudahkan proses pelaporan dan analisis, tetapi juga mempercepat proses kolaborasi antar auditor dalam satu tim maupun lintas bidang.

Selain itu, dashboard pemantauan interaktif dapat dikembangkan untuk menyajikan progres kegiatan pengawasan terhadap perangkat daerah maupun desa binaan secara visual dan dinamis. Dashboard ini memungkinkan pimpinan Inspektorat untuk memantau kinerja tim secara berkala, mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan, serta mengambil keputusan berbasis data. Implementasi dashboard juga membantu meningkatkan transparansi internal dan memudahkan proses evaluasi program berbasis indikator kinerja.

Teknologi e-audit dan sistem dokumen digital juga dapat diterapkan untuk menggantikan proses pelaporan fisik. Format laporan yang terstandar secara digital memudahkan kompilasi dan komparasi antar hasil audit, sekaligus meminimalisasi variasi kualitas antar auditor. Bahkan, dengan penggunaan sistem pengenalan pola atau template berbasis AI, potensi analisis otomatis terhadap pelanggaran atau deviasi dari standar prosedur dapat diidentifikasi lebih cepat dibandingkan metode manual.

Di sisi lapangan, penggunaan aplikasi mobile untuk audit dan monitoring memungkinkan efisiensi signifikan dalam proses kerja. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengisi form pengawasan, mengunggah bukti dokumentasi, mencatat hasil wawancara, serta mengirim data langsung ke server pusat. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan dalam proses input dan rekapitulasi data dapat ditekan, dan akurasi data pun lebih terjamin karena diisi langsung di lokasi pengawasan.

Kemampuan auditor muda dalam mengoperasikan perangkat digital dan aplikasi umum seperti Google Workspace, Microsoft Office 365, serta aplikasi komunikasi daring menunjukkan bahwa SDM Inspektorat memiliki modal dasar digital yang cukup baik. Modal ini dapat dikembangkan melalui pelatihan teknis yang lebih terstruktur dan program pendampingan peer-to-peer, di mana auditor yang lebih adaptif terhadap teknologi membimbing rekan kerja lainnya.

Dari sisi kelembagaan, penerapan teknologi juga membuka peluang untuk membangun sistem knowledge management, di mana temuan-temuan lapangan, best practice, serta rekomendasi audit dapat terdokumentasi dengan baik dan diakses kembali oleh auditor lain di masa mendatang. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pengetahuan dan mengurangi ketergantungan terhadap pengalaman individu, terutama saat terjadi rotasi personel.

Dengan berbagai potensi tersebut, transformasi digital dalam sistem pengawasan bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret menuju penguatan fungsi kontrol internal yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan. Namun, untuk mewujudkan hal ini diperlukan strategi implementasi yang komprehensif, termasuk kesiapan infrastruktur, pelatihan SDM, serta dukungan regulasi dan kebijakan dari pimpinan daerah.

Analisis Kesiapan SDM dan Infrastruktur

Keberhasilan implementasi sistem pengawasan berbasis digital sangat ditentukan oleh dua aspek utama: kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Hasil pengamatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa kedua aspek ini berada pada tingkat kesiapan yang belum merata, sehingga membutuhkan intervensi strategis dan bertahap untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.

Dari aspek SDM, terdapat segmen auditor muda yang menunjukkan kemampuan adaptif terhadap penggunaan teknologi. Mereka terbiasa menggunakan perangkat lunak pengolahan data seperti Microsoft Excel dan Google Sheets, serta aplikasi komunikasi daring seperti WhatsApp, Google Meet, dan Telegram. Kelompok ini memiliki potensi menjadi agen perubahan (change agent) dalam proses digitalisasi karena tidak hanya memiliki kemampuan dasar teknologi, tetapi juga menunjukkan antusiasme terhadap sistem kerja yang lebih efisien dan berbasis data.

Namun demikian, terdapat juga segmen pegawai senior yang masih nyaman dengan pola kerja manual. Beberapa dari mereka mengungkapkan keraguan terhadap efektivitas sistem digital, serta kekhawatiran terhadap kesalahan teknis yang dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman operasional. Gap antargenerasi ini menyebabkan ketimpangan kemampuan digital yang berpotensi menghambat kolaborasi tim secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya pelatihan rutin atau pendampingan teknologi yang terstruktur membuat kemampuan digital belum terstandardisasi di seluruh unit kerja.

Dari sisi infrastruktur, fasilitas penunjang digital di lingkungan Inspektorat Daerah Gianyar masih terbatas. Perangkat keras (hardware) seperti komputer, laptop, dan printer tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak semua pegawai memiliki akses perangkat pribadi yang memadai. Beberapa kegiatan administrasi masih dilakukan dengan komputer bersama secara bergiliran, sehingga memperlambat proses kerja. Selain itu, ketersediaan jaringan internet belum merata di seluruh area kantor dan titik pengawasan lapangan, terutama ketika pengawasan dilakukan di wilayah desa yang konektivitasnya rendah.

Ketiadaan server internal atau cloud storage resmi juga menjadi tantangan tersendiri. Dokumen digital masih disimpan secara lokal di masing-masing perangkat auditor tanpa adanya sistem backup terpusat, sehingga sangat berisiko terhadap kehilangan data apabila terjadi kerusakan perangkat. Tidak adanya sistem berbasis intranet atau platform kolaboratif internal mengakibatkan komunikasi kerja tidak terdokumentasi dan arsip kegiatan tidak tersistem dengan baik.

Dari aspek kebijakan, belum tersedia standar operasional prosedur (SOP) digital yang mengatur tata kelola data, penggunaan aplikasi, hingga pengamanan informasi. Hal ini membuat setiap auditor memiliki gaya kerja yang berbeda, yang tidak selalu sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Di sisi lain, belum ada regulasi lokal yang mewajibkan transisi ke sistem digital atau yang menetapkan roadmap transformasi pengawasan sebagai agenda prioritas.

Meskipun demikian, potensi penguatan tetap terbuka lebar. Dengan dukungan pelatihan berjenjang, penyediaan perangkat dan akses teknologi yang merata, serta penguatan kebijakan internal, proses digitalisasi dapat dipercepat. Pembentukan tim khusus transformasi digital internal dan percontohan pilot project sederhana dapat menjadi langkah awal yang strategis.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengintegrasikan potensi SDM yang ada dengan pengembangan infrastruktur yang memadai sebagai fondasi utama menuju sistem pengawasan yang modern dan tangguh.

Dinamika Organisasi dan Resistensi terhadap Digitalisasi

Perubahan sistem dalam birokrasi, khususnya dalam lembaga pengawasan seperti Inspektorat Daerah, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika organisasi dan kultur kerja yang telah mengakar. Dalam konteks digitalisasi sistem pengawasan internal, resistensi terhadap perubahan menjadi salah satu tantangan yang paling signifikan dan kompleks. Hasil pengamatan dan wawancara informal menunjukkan bahwa resistensi tersebut bersumber dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik secara individual maupun kelembagaan.

Secara individual, pegawai dengan masa kerja yang panjang cenderung merasa lebih nyaman dengan pola kerja yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Sistem manual yang telah menjadi bagian dari rutinitas birokrasi dianggap lebih dapat dikendalikan, meskipun tidak efisien. Ketika dihadapkan pada sistem baru yang berbasis teknologi, muncul kekhawatiran akan ketidakmampuan mengikuti perkembangan serta takut melakukan kesalahan yang berdampak pada kinerja pribadi. Perasaan cemas terhadap perubahan ini diperparah oleh kurangnya dukungan pelatihan atau pendampingan yang intensif.

Di tingkat kelembagaan, tidak adanya strategi manajemen perubahan yang terencana membuat proses adaptasi terhadap digitalisasi berjalan secara sporadis dan tidak terkoordinasi. Tidak semua lini memahami urgensi transformasi digital, bahkan sebagian menganggap bahwa pengawasan berbasis teknologi adalah proyek jangka panjang yang belum menjadi prioritas utama. Pandangan semacam ini menimbulkan persepsi bahwa digitalisasi adalah beban tambahan, bukan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Selain itu, terdapat kecenderungan untuk mempertahankan struktur kerja lama yang bersifat hierarkis dan administratif. Dalam sistem seperti ini, inovasi teknologi seringkali mengalami hambatan karena tidak adanya ruang dialog atau forum internal yang terbuka untuk mengusulkan perubahan. Auditor muda yang memiliki ide digitalisasi merasa enggan untuk menyuarakan gagasan karena khawatir bertentangan dengan pandangan pimpinan atau pegawai senior.

Resistensi juga muncul dari aspek kepemimpinan organisasi. Ketika pimpinan lembaga tidak memberikan dukungan eksplisit terhadap inisiatif digitalisasi, proses perubahan cenderung stagnan. Beberapa pegawai menyatakan bahwa usulan penggunaan aplikasi pengawasan atau platform kolaborasi pernah diajukan, namun tidak ditindaklanjuti secara serius karena dianggap belum mendesak. Ketiadaan visi jangka panjang terkait pengawasan berbasis digital menyebabkan tidak adanya arah perubahan yang jelas.

Namun demikian, dinamika ini tidak sepenuhnya negatif. Justru dari resistensi ini muncul peta tantangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi perubahan organisasi. Kebutuhan akan manajemen perubahan yang partisipatif dan berbasis pada pemahaman sosial menjadi sangat penting. Pendekatan yang menggabungkan pelatihan teknis dengan penguatan kesadaran kolektif tentang manfaat teknologi dalam pengawasan akan lebih efektif dibanding sekadar penerapan sistem baru tanpa sosialisasi.

Strategi komunikasi perubahan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Misalnya, dengan menyertakan pegawai senior dalam proses perancangan sistem digital dan menjadikan mereka sebagai role model, resistensi dapat diubah menjadi dukungan. Demikian pula, keberhasilan kecil dari proyek digitalisasi dapat ditampilkan sebagai studi kasus internal untuk membangun kepercayaan terhadap sistem baru.

Dengan memahami dinamika organisasi secara holistik, maka transformasi digital bukan hanya sekadar perpindahan dari manual ke elektronik, tetapi sebagai proses pembaruan budaya kerja, pola pikir, dan sistem nilai yang menyatu dalam semangat reformasi birokrasi.

Peluang Pengembangan Sistem Pengawasan Digital

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan sistem pengawasan digital di Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar sangat terbuka. Peluang ini muncul dari kombinasi antara kebutuhan kelembagaan terhadap efisiensi kerja, potensi pemanfaatan teknologi yang semakin terjangkau, serta adanya sumber daya manusia muda yang relatif adaptif terhadap perkembangan digital.

Salah satu peluang paling menjanjikan adalah pengembangan platform digital internal untuk mendukung proses audit dan asistensi. Platform ini dapat dirancang secara modular, mencakup fitur seperti form digital untuk entry meeting, pelaporan temuan, upload dokumen pendukung, hingga dashboard monitoring progres pengawasan per desa atau perangkat daerah. Dengan desain yang sederhana namun terstruktur, auditor dapat mengakses dan menginput data langsung di lapangan, yang otomatis tersimpan dalam sistem pusat.

Selain itu, sistem pelaporan berbasis web juga menjadi solusi realistis untuk menggantikan laporan manual yang selama ini dikompilasi dalam format Word atau Excel tanpa standar baku. Aplikasi ini dapat dilengkapi dengan menu validasi otomatis, integrasi peta wilayah pengawasan (geo-tagging), dan fitur notifikasi kepada pimpinan bila terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian data. Sistem semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaporan, tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi kerja auditor.

Dari segi data, peluang besar juga terdapat pada pengembangan sistem basis data tematik yang mampu menyimpan dan mengarsipkan seluruh hasil audit, baik dalam bentuk dokumen, grafik, maupun narasi. Basis data ini dapat digunakan sebagai sumber informasi berkelanjutan untuk keperluan evaluasi program pemerintah, penyusunan rekomendasi kebijakan, maupun bahan pelatihan auditor baru. Dengan sistem pencarian cerdas, pengguna dapat mengakses laporan berdasarkan lokasi, jenis kegiatan, maupun status penyelesaian tindak lanjut.

Peluang digitalisasi juga dapat dikembangkan melalui kemitraan strategis. Inspektorat dapat bekerja sama dengan lembaga pengawasan lain di tingkat provinsi maupun nasional dalam merancang sistem yang sesuai dengan karakteristik birokrasi daerah. Kolaborasi dengan instansi teknis seperti Dinas Kominfo atau mitra akademik dari perguruan tinggi dapat mempercepat proses pengembangan sistem yang kontekstual dan user-friendly. Pengalaman dan sumber daya dari lembaga eksternal ini sangat membantu dalam meminimalkan trial and error yang sering muncul dalam proses transformasi digital.

Di sisi internal, peluang pengembangan juga datang dari dukungan kebijakan daerah. Jika pimpinan daerah dan kepala Inspektorat memiliki komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi, maka penyusunan regulasi internal seperti SOP digital, peta jalan (roadmap) transformasi, serta alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat dan pelatihan akan menjadi lebih mudah direalisasikan. Komitmen kebijakan ini merupakan fondasi penting agar sistem yang dikembangkan tidak hanya bertahan sesaat, tetapi mampu berfungsi secara berkelanjutan.

Terakhir, potensi digitalisasi juga dapat diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif. Misalnya, melalui pengembangan kanal pelaporan daring (online grievance mechanism), masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa, yang datanya kemudian diverifikasi dan diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan internal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi publik, tetapi juga memperluas jangkauan pengawasan dengan biaya yang lebih efisien.

Dengan berbagai peluang tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar memiliki modal awal yang kuat untuk membangun sistem pengawasan digital yang progresif, adaptif, dan partisipatif. Tantangan yang ada bukanlah penghalang mutlak, tetapi menjadi pijakan untuk merancang strategi transformasi yang berbasis bukti, kolaboratif, dan berorientasi masa depan.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Temuan-temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi penting bagi arah kebijakan pengawasan internal di tingkat daerah, khususnya dalam konteks digitalisasi sistem birokrasi. Ketergantungan terhadap pendekatan manual yang masih mendominasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi sistemik, bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, dan budaya organisasi.

Implikasi kebijakan pertama adalah pentingnya penyusunan peta jalan (roadmap) transformasi digital pengawasan internal yang dirancang secara partisipatif. Roadmap ini perlu memuat tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang yang realistis dan terukur, mencakup target pengembangan sistem, peningkatan kapasitas SDM, pengadaan infrastruktur, serta regulasi pendukung. Dokumen ini juga harus mencerminkan visi jangka panjang pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola yang adaptif dan akuntabel berbasis data.

Kedua, diperlukan penguatan kebijakan kelembagaan berupa penerbitan Peraturan Kepala Inspektorat atau Surat Edaran yang mewajibkan standar kerja digital dalam proses pengawasan. Standar ini meliputi penggunaan sistem informasi manajemen pengawasan, format pelaporan digital baku, dan mekanisme penyimpanan data elektronik. Dengan dukungan regulasi formal, digitalisasi tidak lagi bersifat opsional, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja yang terintegrasi.

Ketiga, dari sisi sumber daya manusia, perlu dikembangkan program pelatihan dan pendampingan teknologi berbasis kebutuhan aktual. Program ini harus mencakup pelatihan dasar bagi pegawai senior yang masih awam terhadap teknologi, serta pelatihan lanjutan bagi pegawai yang sudah menguasai keterampilan digital. Pendekatan berbasis peer mentoring dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses adopsi teknologi, dengan melibatkan auditor muda sebagai fasilitator pembelajaran internal.

Keempat, penting bagi Inspektorat Daerah untuk menjalin kemitraan eksternal yang strategis, baik dengan lembaga pengawasan nasional seperti BPKP dan KPK, maupun dengan instansi pengembang teknologi informasi di daerah. Kolaborasi ini dapat mempercepat proses pengembangan sistem digital yang kontekstual dan kompatibel dengan sistem nasional, sekaligus memperkuat posisi Inspektorat Daerah dalam ekosistem pengawasan nasional.

Kelima, sebagai bagian dari reformasi birokrasi, transformasi digital perlu didukung oleh kebijakan insentif berbasis kinerja. Auditor atau tim yang berhasil menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi dengan baik dapat diberikan apresiasi, baik dalam bentuk pengakuan kelembagaan maupun penghargaan berbasis indikator kinerja individu. Pendekatan ini tidak hanya mendorong motivasi, tetapi juga mempercepat internalisasi nilai-nilai efisiensi, akurasi, dan inovasi.

Terakhir, penerapan sistem digital harus tetap memperhatikan aspek etika dan keamanan data. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan privasi, mekanisme kontrol akses data, serta audit internal atas penggunaan sistem teknologi. Keamanan data merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan, terutama dalam pengawasan terhadap program-program pemerintah yang sensitif.

Dengan berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar dapat menjadi model penerapan sistem pengawasan digital yang tidak hanya responsif terhadap tantangan zaman, tetapi juga selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan integritas, efisiensi, dan akuntabilitas. Transformasi ini bukan hanya sekadar

adopsi teknologi, melainkan sebuah lompatan paradigma dalam cara kerja pengawasan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar masih berjalan dengan pendekatan manual yang kurang mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Kegiatan pengawasan seperti asistensi dan pelaporan masih bergantung pada pencatatan fisik, penyimpanan dokumen non-terpusat, serta komunikasi informal yang tidak terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menimbulkan berbagai kendala, antara lain rendahnya efisiensi operasional, ketidakteraturan dokumentasi, serta terbatasnya kolaborasi antar auditor.

Temuan lapangan juga mengindikasikan bahwa terdapat potensi signifikan untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital, terutama dengan adanya sumber daya manusia muda yang adaptif terhadap teknologi serta kesadaran awal akan kebutuhan modernisasi. Namun, kesiapan SDM yang belum merata, infrastruktur yang terbatas, serta resistensi budaya organisasi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui pendekatan bertahap dan strategis.

Secara keseluruhan, digitalisasi sistem pengawasan internal di Inspektorat Daerah Gianyar sangat mungkin untuk diwujudkan apabila didukung oleh kebijakan yang visioner, peningkatan kapasitas teknis pegawai, serta pengembangan infrastruktur dan sistem yang terintegrasi. Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah di era digital.

6. REFERENSI

- Astuti, D., & Lestari, R. (2022). Digitalisasi Pengawasan Desa: Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 87–95. <https://doi.org/10.24832/jakp.v13i2.467>
- Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, H., & Suryadi, A. (2022). Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan Pemerintahan Desa. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 10(1), 56–65. <https://doi.org/10.33369/jtsi.v10i1.1421>
- Gunawan, T. (2021). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 3(2), 57–68.
- Hansen, D. R., Cuganesan, S., & Dumay, J. (2021). Digitalisation and Public Sector Accountability: A Systematic Literature Review. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(6), 1272–1298. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2019-4325>
- Kartika, Y., & Rahayu, E. (2019). Manajemen Perubahan dan Implementasi Teknologi Informasi di Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 8(1), 34–44. <https://doi.org/10.14710/jmo.v8i1.23456>
- KemenPAN-RB. (2021). *Inovasi Pelayanan Publik: ASTAMA Gianyar*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kurniawan, D., & Nugroho, A. (2020). Kelemahan Sistem Manual dalam Pengawasan APIP di Pemerintah Daerah. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(2), 101–110.
- Kurniawan, T. (2020). Digitalisasi pengawasan internal pemerintahan: Studi kasus Inspektorat Daerah. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(1), 45–56.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Andi Publisher.
- Nugroho, A. (2020). Penguatan Peran APIP dalam Pengawasan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 12–23.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Pertiwi, F. D., Aulia, M. R., & Saputra, I. G. (2021). Kinerja Pengawasan Manual dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 6(1), 45–53.
- Prasetyo, A. (2023). Evaluasi sistem pelaporan pengawasan Inspektorat: Studi pada Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Daerah*, 5(1), 66–78.
- Rahmawati, S. (2020). Evaluasi Kesiapan Digitalisasi Pengawasan Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 5(2), 77–88.
- Siregar, A. (2021). Smart governance: Konsep dan implementasinya di pemerintahan daerah. *Jurnal Birokrasi Dan Administrasi Negara*, 4(2), 101–112.
- Susanti, D. (2021). Kesiapan infrastruktur digital dalam pengawasan pemerintahan daerah. *Jurnal Transformasi Digital*, 2(3), 89–97.
- Tummers, L. G. (2021). Public innovation and digitalization: A systematic literature review. *Public Management Review*, 23(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1645871>
- Wibowo, A. (2020). Reformasi birokrasi digital di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 1(1), 20–30.
- Wulandari, M. (2022). Tantangan pengawasan berbasis teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 6(2), 98–110.
- Yani, R. (2022). Peran strategis Inspektorat Daerah dalam pengawasan program pemerintah. *Jurnal Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 9(1), 32–45.